



Kantor Regional XII
Badan Kepegawaian Negara

2021
Rencana Kerja



 Kanreg12bkn  Kanreg12bkn  KanregXIIbkn



KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu harus memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya *Good Governance*.

Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Manajemen ASN, maka setiap tahun seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran. Secara khusus di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Renja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dengan indikator kinerja Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Negara 2020 - 2024, dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021.

Untuk mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik dan memenuhi amanat sebagaimana dimaksud serta seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja, Badan Kepegawaian Negara perlu melakukan perubahan Renja Tahun 2020. Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021 untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021.

Pekanbaru, 02 Juni 2020

Kepala Kantor Regional XII BKN,



Drs. Margi Prayitno, MAP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. RUANG LINGKUP	3
BAB II ARAH KEBIJAKAN KANTOR REGIONAL XII BKN	4
BAB III RENCANA KERJA	8
A. SASARAN TAHUN 2021	9
B. PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2021	10
C. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2021	11
BAB IV PENUTUP	15
LAMPIRAN	16

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

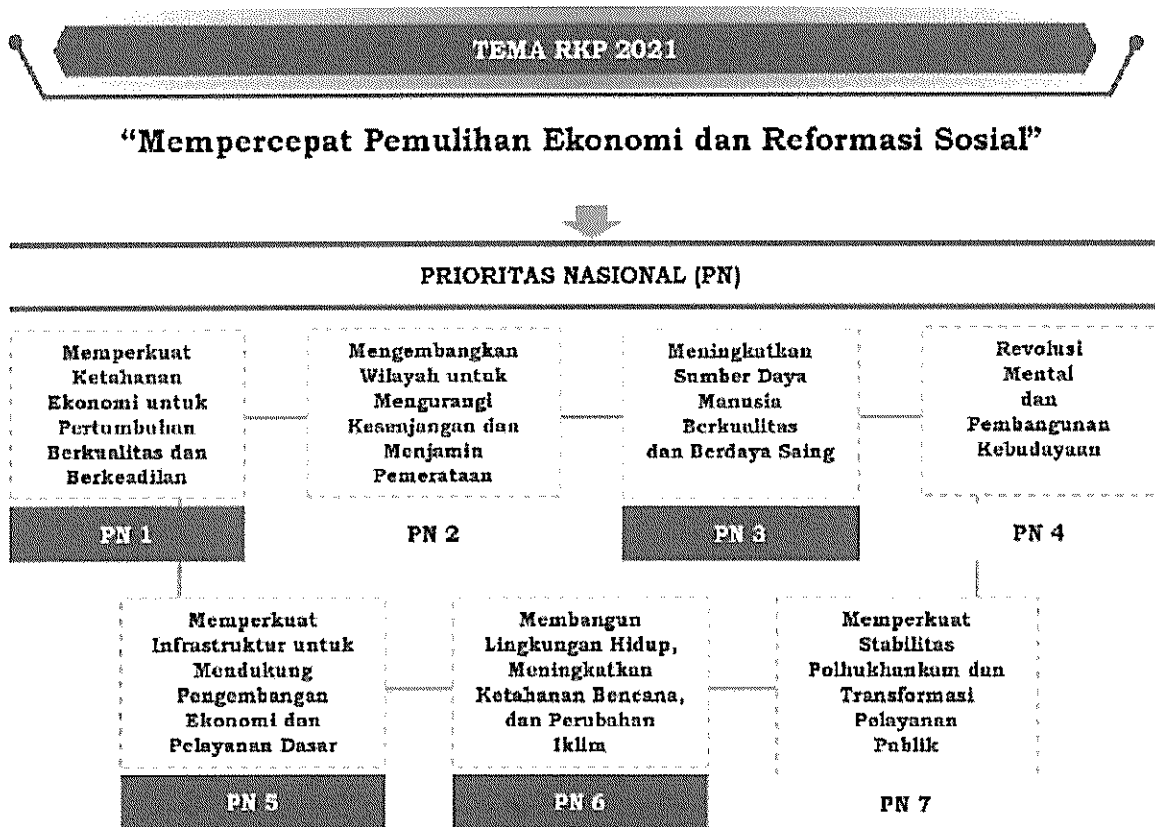
Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-201 dengan indikator kinerja (Covid-1 dengan indikator kinerja). Pandemi COVID-1 dengan indikator kinerja telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial. Pasca pandemi Covid-1 dengan indikator kinerja, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (*new normal*), dimana proses transformasi akan terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan nasional, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2019 dengan indikator kinerja menunjukkan bahwa PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air dan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya masih memberikan ruang untuk dilakukan peningkatan kinerjanya. Dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut dan kondisi Indonesia pada tahun 2020 maka tema RKP 2021, ***“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”***.

Dokumen RKP 2021 menjabarkan rencana pembangunan secara lebih rinci ke dalam Prioritas Nasional, Prioritas Program, dan Kegiatan Prioritas dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif, adapun 7 (tujuh) PN RKP 2021 meliputi :

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.



PN yang memperoleh penekanan di tahun 2021

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Melihat kepada kondisi saat ini serta adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja dan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara perlu menyusun dan menyesuaikan kembali perubahan Rencana Kerjanya dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Manajemen ASN pada tahun 2021.

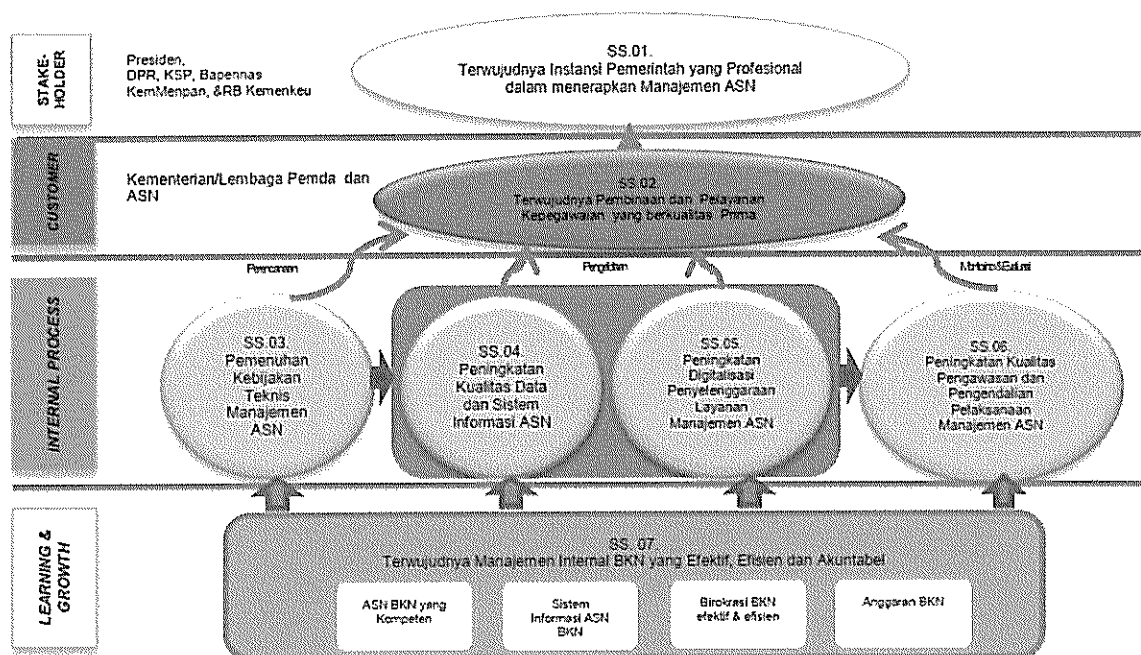
C. RUANG LINGKUP

Rencana Kerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:

1. Arah kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Tahun 2021;
2. Program Prioritas Tahun 2021;
3. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021.

BAB II ARAH KEBIJAKAN KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Sesuai dengan draft Rencana Strategis Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024, Visi Kantor Regional XII BKN yang selaras dengan visi Badan Kepegawaian Negara adalah “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara” yang merupakan pelaksanaan Misi Presiden Nomor 8, sesuai dengan Arahan Presiden Nomor 4 serta sesuai dengan Agenda Pembangunan Nomor 7.



Peta Strategis Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara 2020-2024

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh program yang akan dilaksanakan (money follow program), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget-driven) atau karena tugas fungsi organisasi (money follow function). Teknis perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan

dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan.

Pendekatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 akan fokus pada aspek ekonomi dan reformasi sosial pasca pandemi virus corona (Covid-19). Dalam RKP 2021 satu dari tujuh Prioritas Nasional yang merupakan tujuh agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah transformasi pelayanan publik.

Arah Kebijakan dan Strategi Badan Kepegawaian Negara

1. Peranan Strategis BKN dalam Pengelolaan ASN

Bersama-sama dengan KASN dan LAN (dengan fungsi dan tugas masing-masing), BKN mempunyai peranan penting dan strategis dalam pengelolaan ASN. Jumlah ASN saat ini sekitar 4,5 juta orang. Apabila jumlah ASN yang besar ini dikelola dengan efisien dan efektif maka BKN akan memberikan andil besar dalam mencapai tujuan bernegara. Sebaliknya apabila BKN tidak mampu mengelola dengan baik jumlah ASN yang sangat besar ini, maka BKN juga memberikan andil besar dalam menghambat kemajuan bangsa.

Peran yang penting dan strategis BKN itu dapat dilihat dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu mandate dan tugas yang diberikan pada BKN adalah merevitalisasi sistem dan manajemen birokrasi sehingga lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada pencapaian kinerja. Juga diamanatkan BKN untuk melakukan pengembangan kualitas modal manusia sebagai pendorong utama (*prime mover*) reformasi birokrasi. Dalam melakukan semua itu secara eksternal BKN harus memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan strategis. Ada 3 (tiga) isu strategis bidang aparatur negara sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu (1) pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (2) pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (3) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di samping itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin mutakhir; proses demokratisasi dan desentralisasi; dan kultur birokrasi yang masih diwarnai politisasi, praktik KKN, inefisiensi dan rendahnya kapasitas sumber daya aparturnya. Secara internal, juga ada tiga faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan supaya BKN mampu merealisasikan potensi dan tugasnya. Ketiga faktor itu adalah: 1) kompetensi

dan profesionalitas modal manusia, 2) budaya organisasi yang mendorong pada kemajuan, peningkatan produktivitas dan inovasi, dan 3) kualitas kepemimpinan di dalam tubuh BKN sendiri.

2. Peran Strategis BKN dalam Sistem Integritas Nasional

Reformasi birokrasi sudah menjadi agenda dan kepentingan nasional. Pemerintah Presiden Joko Widodo dengan menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu program unggulan. BKN perlu ambil bagian dan memberikan kontribusi penting dalam agenda nasional tersebut untuk Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN, dengan sasaran tersebut, maka kontribusi mewujudkan manajemen talenta nasional dan ASN yang Profesional. Dalam bingkai roadmap reformasi birokrasi ini maka ada dua aspek penting yang melekat dan dapat disumbangkan BKN yaitu: kompetensi organisasi dan focus organisasi. Dalam hal kompetensi organisasi, BKN perlu senantiasa meningkatkan kompetensi dan keunggulannya sepanjang waktu. Dalam konteks focus organisasi, maka BKN harus memilah dan memilih skala prioritas dalam merealisasikan visi dan misi, dengan memberikan focus pada penanganan reformasi birokrasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disebut sebagai sistem Integritas Nasional. Dalam sistem itu ada tiga elemen pokok yaitu pondasi, tiang/pilar penyangga dan atap. Pondasinya adalah sistem ekonomi, politik dan budaya. Tiangnya adalah badan/lembaga legislative, eksekutif, kehakiman/ peradilan, sektor publik, sektor keuangan, penegak hukum, komisi pemilihan umum, komisi Ombudsman, lembaga audit, organisasi anti korupsi, partai politik, media massa, masyarakat madani dan dunia usaha. Atapnya, yaitu hasil akhir yang akan dicapai berupa integritas nasional. Meskipun bukan salah satu pilar, akan tetapi fungsi, tugas dan kewenangan BKN mempunyai peranan sangat penting dan determinan dalam membangun Sistem Integritas Nasional. Apabila fungsi, tugas dan kewenangan BKN dilaksanakan secara optimal BKN akan memberikan andil dan kontribusi penting dalam membangun birokrasi yang handal mengelola layanan publik tanpa KKN.

3. Mencegah dan Memberantas Korupsi dalam Tubuh BKN

Sasaran strategis nomor enam merupakan sasaran strategis yang baru yang membedakannya secara signifikan dengan dua Renstra sebelumnya. Keberadaan sasaran strategis nomor enam ini juga mengejawantahkan salah satu arah kebijakan reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih yang bebas dari KKN.

Ada 5 indikator Kinerja Utama yang terkait dengan upaya pengembangan dan optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kelima indikator itu adalah 1) persentase PNS yang terlibat dalam tindak pidana korupsi (yang sudah berketetapan hukum, minimal tingkat pengadilan negeri) dalam satu instansi, 2) persentase nilai kerugian keuangan negara terhadap nilai belanja instansi dalam satu tahun fiskal, 3) adanya sistem manajemen anti suap (penerapan SNI ISO 37001) dalam setiap instansi, 4) adanya unit pengendalian gratifikasi dalam setiap instansi, dan 5) adanya mekanisme penanganan keluhan publik yang responsif dan efektif terkait perkara korupsi.

Memasukkan ini sebagai salah satu sasaran strategis berimplikasi pada perlunya merevisi kerangka peraturan perundang-undangan sehingga ada payung hukum yang memadai untuk menerapkannya.

4. Peran BKN dalam agenda Revolusi Mental

Di dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2016, salah satu Gerakan Revolusi Mental adalah Program Gerakan Indonesia Melayani. BKN sebagai lembaga negara yang melakukan pembinaan manajemen ASN dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, bentuk dukungan yang diberikan adalah membangun sebuah sistem pengembangan karier PNS.

BKN mendorong instansi pemerintah agar di dalam pengembangan karier PNS tidak hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah saja tetapi juga mempertimbangan integritas dan moralitas sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 6 dengan indikator kinerja Ayat 2. Integritas yang dimaksud diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan moralitas yang dimaksud diukur dari penerapan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

Maka BKN akan mengeluarkan guidance dalam bentuk Peraturan Kementerian PAN & RB tentang penerapan integritas dan moralitas serta Peraturan Kepala BKN terkait penerapan integritas dan moralitas dalam pengembangan karier PNS. Kemudian

langkah selanjutnya BKN melalui Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian akan melakukan pengukuran sampai sejauh mana instansi menerapkan integritas dan moralitas di dalam pengembangan karier PNS.

BAB III
RENCANA KERJA

A. SASARAN TAHUN 2021

Sasaran Strategis Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam menentukan Sasaran Strategis, Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara menggunakan pendekatan metode *Balance Scorecard*(BSC) melalui 4 (empat) perspektif, yaitu: (1) *Stakeholders Perspective*, (2) *Customer Perspective*, (3) *Internal Perspective*, dan (4) *Learning & Growth Perspective*. Secara rinci, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Sasaran Strategis Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021

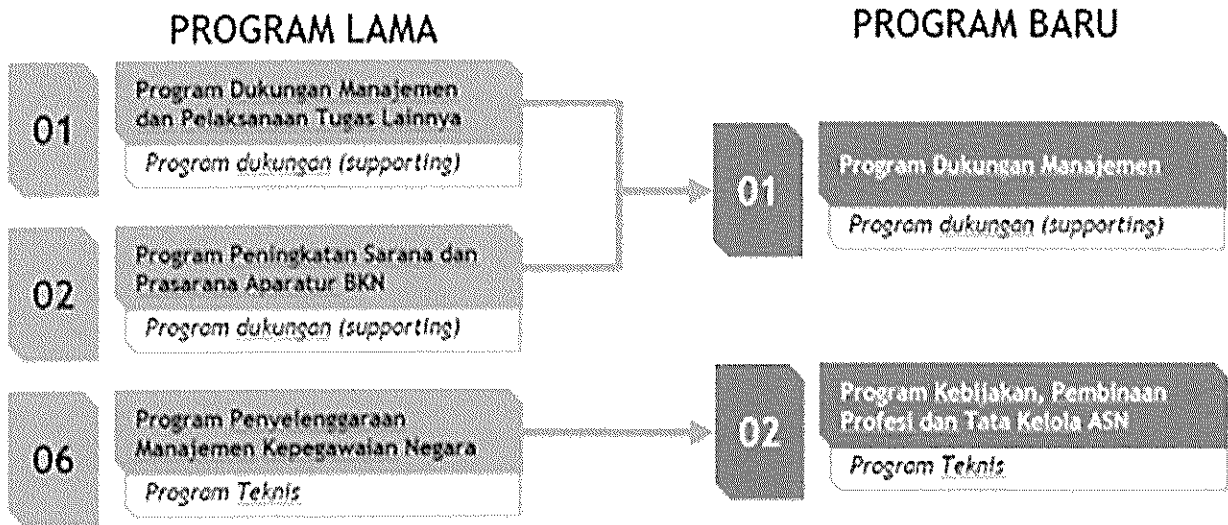
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
<i>Stakeholder Perspective</i>				
1.	Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	1.	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN Sesuai NSPK Di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	20%
		2.	Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	90%
<i>Customer Perspective</i>				
2.	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN	88
		4.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN	91
<i>Internal Process Perspective</i>				
3.	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	5.	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN	85%
4.	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem	6.	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang	87%

	Informasi ASN		Terintegrasi dengan SI ASN Di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	
5.	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	7.	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital Di Kantor Regional XII BKN	80%
6.	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti Di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	65%
Learning & Growth Perspective				
7.	Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel	9.	Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XII BKN	72
		10.	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XII BKN	100%
		11.	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XII BKN	81
		12.	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN	76
		13.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional XII BKN	91%
		14.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100%

B. PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2021

Menindaklanjuti Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-375/MK/02/2020, B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pelaksanaan restrukturisasi Program K/L yang berlaku efektif di TA 2021. Kebijakan restrukturisasi dilakukan pada tingkat Program, dimana nomenklatur Program dapat digunakan oleh satu atau lebih dari satu Kementerian /Lembaga, selanjutnya disebut Program Lintas K/L. Adapun tujuan dari restrukturisasi Program K/L adalah 1). Meningkatkan sinkronisasi program pembangunan nasional dalam dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran, 2).Meningkatkan Integrasi dan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran belanja negara, 3).

Mengurangi tumpang tindih kegiatan antar K/L, 4). Mempertajam rumusan program sehingga dapat mencerminkan substansi program secara langsung sesuai dengan nama program.



Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-376/MK/02/2020, B-310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun Anggaran 2021, Pagu Anggaran Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara adalah sebesar Rp 12.187.627.000,-. Rincian pagu indikatif Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Program dan Anggaran Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021

Belanja Pegawai	5.980.362.000
Belanja Barang Operasional	5.085.119.000
Belanja Barang Non Operasional	1.663.146.000
Belanja Modal	759.000.000
Total	13.487.627.000

C. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2021

Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*) serta

penguatan kapasitas kebijakan *countercyclical* baik melalui penguatan *automatic stabilizer* maupun pencadangan belanja *anticipatory*. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang akan berlaku efektif untuk TA 2021.

Sinergi Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam merumuskan Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dituangkan dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.8/PP.04.05/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 Hal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2021, pagu indikatif telah disajikan berdasarkan program hasil Redesain Sistem Penganggaran.

Penyederhanaan Redesain Turunan Program yang meliputi Rumusan Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output, dan Rincian Output, beserta desain arsitekturnya. Kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur yang identik dengan UKE II atau Satker vertikal dari K/L, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh Unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran. Keluaran harus mencerminkan *“real work”* atau *“eye catching”* merupakan produk akhir dari pelaksanaan kegiatan dengan rumusan KRO dan RO. Berikut adalah program yang telah direstrukturisasi dan diredesign di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara :

1. Program Generik, yaitu Program Dukungan Manajemen merupakan penggabungan dari beberapa program:
 - Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN
 - Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN
 - Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara
2. Program Teknis, yaitu Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN 2020-2024, bersifat lintas K/L.

Berikut penyesuaian program, KRO dan RO untuk Badan Kepegawaian Negara dan Satuan Kerja dibawahnya sebagai dampak dari penerapan RSPP.

1) Program Dukungan Manajemen

Aktivitas yang dilaksanakan ;

- a) Pengelolaan Organisasi dan SDM dengan indikator kinerja:
 - Indeks kepuasan pegawai Kantor Regional XII BKN terhadap pengelolaan dan pembinaan SDM di Kantor Regional XII BKN sesuai NSP
 - Indeks Profesionalitas ASN/Pegawai di Kantor Regional XII BKN
 - Persentase kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai di Kantor Regional XII BKN
- b) Pengelolaan keuangan, BMN dan Umum dengan indikator kinerja:
 - Pengelolaan laporan keuangan yang sesuai SAP
 - Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dan pemanfaatan anggaran Kantor Regional XII BKN
 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP BKN dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas kinerja di Kantor Regional XII BKN
 - Pengelolaan BMN yang efektif, efisien dan optimal di Kantor Regional XII BKN
 - Persentase pemenuhan sarana operasional kantor sesuai dengan standar
 - Persentase ketersediaan informasi yang sesuai standar layanan informasi publik.

2) Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN

Aktivitas yang dilaksanakan :

- a) Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian ASN dengan indikator kinerja :
 - Indeks kepuasan atas pelayanan kepegawaian di bidang pengadaan dan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya
 - Persentase pelayanan di bidang pengadaan dan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya berbasis digital
 - Persentase pelayanan pensiun berbasis digital
 - Indeks kepuasan atas pelayanan kepegawaian di bidang pengangkatan dan pensiun
 - Indeks kepuasan atas pelayanan kepegawaian di bidang status dan kedudukan kepegawaian

- Persentase pelayanan tata naskah arsip kepegawaian yang berbasis digital
- b) Pengelolaan dokumen arsip kepegawaian, data dan sistem informasi ASN dengan indikator kinerja :
- Persentase tata naskah kepegawaian ASN yang dikelola
 - Persentase digitalisasi arsip kepegawaian
 - Persentase pemutahiran data ASN
 - Persentase integrasi data ASN
 - Persentase pembangunan dan pengembangan SI ASN yang terintegrasi
- c) Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN dengan indikator kinerja :
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN terhadap peraturan perundang undangan
 - Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang diselesaikan sesuai target
 - Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran indeks profesional ASN
 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN di bidang jabatan
 - Persentase pelaksanaan penilaian kinerja ASN dengan menggunakan teknologi informasi
 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN di bidang kinerja
 - Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN sesuai dengan NSPK
 - Persentase instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan tata kelola manajemen ASN sesuai NSPK
 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti

Untuk Penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan, sumber daya, dan pengelolaan administrasi di Kantor Regional XII BKN yang mendukung program pusat, baik Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) disamakan untuk per programnya.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan rencana kerja tahun 2021 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024. Perubahan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dengan indikator kinerja Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, dan juga mengacu pada Peta Strategis Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021 ini merupakan acuan bagi unit eselon II mandiri Badan Kepegawaian Negara dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2021. Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara tahun 2021 perlu diambil langkah-langkah yang optimal melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih mantap berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik internal maupun eksternal

LAMPIRAN

- Rekap 1 : Sasaran Strategis dan IKU K/L pada Aplikasi Krisna Bappenas
- Rekap 2 : Program KL pada Aplikasi Krisna
- Rekap 3 : Matriks Renstra K/L pada Aplikasi Krisna

LAMPIRAN

REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA :

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2. PROGRAM :

01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN

3. SASARAN PROGRAM :

01 – Meningkatkan efektifitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan, sumber daya serta pengelolaan administrasi di lingkungan BKN

4. KEGIATAN :

3636 – Penyelenggaraan Operasional dan Tugas Teknis Lainnya Kanreg dan Satker

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) :

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Meningkatkan kualitas layanan operasional di Kantor Regional XII BKN	2 Layanan	13.679.855.-
01.01	Indeks kepuasan pegawai atas layanan operasional di Kantor Regional XII BKN	BAIK	13.679.855.-
Total			13.679.855.-

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)								
				VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)				
								2022	2023	2024	2022	2023	2024		
01	Meningkatkan kualitas layanan operasional di Kantor Regional XII BKN														
01.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker			1	Layanan		623.246,-	1Layanan	1Layanan	1Layanan	655.426,-	674.426,-	764.926,-		
01.970.051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran						78.920,-				80.920,-	81.920,-	83.920,-		
01.970.051.A	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)						5.000,-				5.000,-	5.000,-	5.000,-		
01.970.051.B	Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja						6.400,-				6.400,-	6.400,-	6.400,-		
01.970.051.C	Penyusunan RAB						5.000,-				5.000,-	5.000,-	5.000,-		
01.970.051.D	Penyusunan Dokumen Renja						5.000,-				5.000,-	5.000,-	5.000,-		
01.970.051.E	Penyusunan RKAKL						57.520,-				59.520,-	60.520,-	62.520,-		
01.970.052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi						48.506,-				50.506,-	53.506,-	56.506,-		
01.970.052.A	Penyusunan Laporan Kinerja						18.506,-				18.506,-	18.506,-	18.506,-		
01.970.052.B	Penyusunan Laporan E-Monev						30.000,-				32.000,-	35.000,-	38.000,-		
01.970.053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan						60.000,-				62.000,-	65.000,-	67.500,-		
01.970.054	Pengelolaan Kepegawaian						360.000,-				380.000,-	405.000,-	460.000,-		
01.970.054.A	Administrasi Kepegawaian						5.000,-				5.000,-	5.000,-	5.000,-		
01.970.054.B	Pembinaan dan Pengembangan Pegawai						355.000,-				375.000,-	400.000,-	455.000,-		
01.970.055	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan						75.820,-				82.000,-	92.000,-	97.000,-		
01.970.055.A	Penatausahaan BMN						50.360,-				55.000,-	60.000,-	62.000,-		
01.952.051.B	Hubungan Masyarakat dan Penyediaan Informasi Publik						25.460,-				27.000,-	32.000,-	35.000,-		
01.994	Layanan Perkantoran			1	Layanan		13.056.609	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	14.396.043,-	15.598.074,-	16.588.694,-		

01.994.002.T	Laporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (UPT BKN Padang)	Utama	21.000,-										21.000,-
01.994.002.U	Laporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (UPT BKN Batam)	Utama	12.000,-										12.000,-
	Total		13.679.855,-										13.679.855,-

Pekanbaru, 09 Maret 2020
Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru



Drs. Margi Prayitno, MAP
NIP. 19641207 198303 1 001

REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA :
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2. PROGRAM :
 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN

3. SASARAN PROGRAM :
 01 - Terlaksananya Pembangunan, Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana di BKN

4. KEGIATAN :
 3638 - Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kanreg dan Satker

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) :
 Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
02	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Regional XII BKN		3.844.217,-
01.02	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Kantor Regional XII BKN	100%	3.844.217,-
Total			3.844.217,-

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)							
				VOLUME TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)			
		Provinsi	Kab/Kota					2022	2023	2024	2022	2023	2024	
01	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Regional XII BKN													
01.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			1	layanan		3.844.217,-	1 layanan	1 layanan	1 layanan				
01.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor			2	Unit		396.217,-				367.000,-	367.000,-	367.000,-	
01.951.052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi			31	Unit		295.000,-				295.000,-	295.000,-	295.000,-	
01.951.053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			28	Unit		390.000,-				390.000,-	390.000,-	410.000,-	
01.951.054	Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan			5	Paket		2.763.000,-				750.000,-	760.000,-	770.000,-	
	Total						3.844.217,-				1.802.000,-	1.812.000,-	1.842.000,-	

B. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
02	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Regional XII BKN												
02.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		3.844.217,-										3.844.217,-
02.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Utama	396.217,-										396.217,-
02.951.052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi	Utama	295.000,-										295.000,-
02.951.053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Utama	390.000,-										390.000,-
02.951.054	Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan	Utama	2.763.000,-										2.763.000,-
	Total		3.844.217,-										3.844.217,-

Pekanbaru, 09 Maret 2020
Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru



Drs. Margi Prayitno, MAP
NIP. 19641207 198303 1 001

REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA :
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2. PROGRAM :
 06 - Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara

3. SASARAN PROGRAM :
 01 – Meningkatkan sistem pembinaan manajemen kepegawaian yang optimal
 02 – Meningkatkan mutu pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi
 03 – Terwujudnya sistem informasi manajemen ASN yang terintegrasi dan pengelolaan arsip kepegawaian yang komprehensif
 04 – Meningkatkan efektifitas system pengawasan dan pengendalian kepegawaian
 05 – Terwujudnya sistem perencanaan pegawai, seleksi CPNS, dan pembinaan karier ASN yang tepat, obyektif, dan transparan.
 06 - Mewujudkan ASN yang profesional.

4. KEGIATAN :
 3658 – Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian Kantor Regional XII BKN

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) :
 Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Layanan kepegawaian Kantor Regional I-XIV BKN sesuai norma, standar, dan prosedur.		
01.01	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dengan Sistem CAT yang sesuai target	1 Layanan Kepegawaian	240.000,-
01.02	Pelaksanaan Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian	30 Pegawai	371.055,-
01.03	Penyelesaian permasalahan kepegawaian di wilayah Kerja	1 Dokumen	66.160,-
01.04	Penyelesaian Nota Persetujuan KP, PMK dan Mutasi Lainnya	40.000 NP	130.000,-
01.05	Pelaksanaan layanan penetapan NIP CPNS	1 Laporan	40.000,-
01.06	Penyelesaian Karpeg / Karis / Karsu yang ditetapkan	1 Laporan	26.000,-
01.07	Penyelesaian PERTEK / SK Pensiun yang ditetapkan	7.000 Pertek	120.040,-
01.08	Penyelenggaraan supervisi dan / atau fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian	2 Dokumen	359.182,-
01.09	Pengelolaan tata naskah kepegawaian	260.000 Tata Naskah	545.000,-
Total			1.897.437,-

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021				PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)			
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	
01	Layanan kepegawaian Kantor Regional I-XIV BKN sesuai norma, standar, dan prosedur.											
01.001	Layanan Kepegawaian Kantor Regional XII BKN	1	Layanan Kepegawaian		240.000,-	1 Layanan Kepegawaian	1 Layanan Kepegawaian	1 Layanan Kepegawaian	254.000,-	254.000,-	254.000,-	
01.001.051	Pelayanan Pelaksanaan CAT Kantor Regional I – XIV BKN				200.000,-				210.000,-	210.000,-	210.000,-	
01.001.051.A	Pelaksanaan CAT Kanreg XII BKN Pekanbaru				85.000,-				90.000,-	90.000,-	90.000,-	
01.001.051.B	Pelaksanaan CAT UPT BKN Padang				50.000,-				55.000,-	55.000,-	55.000,-	

01.001.051.C	Pelaksanaan CAT UPT BKN Batam		65.000,-															
01.001.052	Pelayanan Pelaksanaan Assesment Center Kantor Regional I - XIV BKN	Utama	40.000,-															40.000,-
01.003	Diklat Fungsional Kepegawaian		371.055,-															371.055,-
01.003.051	Pelaksanaan Diklat Fungsional Kepegawaian	Utama																
01.003.051.C	Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian		371.055,-															371.055,-
01.009	Dokumen Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian Wilayah Kerja Kantor Regional I - XIV BKN		66.160,-															86.160,-
01.009.051	Permasalahan Kepegawaian yang dikelola	Utama	66.160,-															
01.010	Nota Persetujuan KP, PMK, dan mutasi lainnya Kanreg XII BKN		130.000,-															86.160,-
01.010.051	Penetapan Nota persetujuan KP, PMK dan mutasi lainnya	Utama	130.000,-															180.000,-
01.011	Layanan Penetapan NIP		40.000,-															
01.011.051	Laporan Penetapan NIP CPNS	Utama	40.000,-															180.000,-
01.012	Karis/karsu/karpeg yang ditetapkan Kantor Regional XII BKN		26.000,-															70.000,-
01.012.051	Penetapan Karis/Karsu/Karpeg	Utama	26.000,-															
01.013	PERTEK/SK Pensiun yang ditetapkan Kantor Regional I - XIV BKN		120.040,-															70.000,-
01.013.051	Penetapan PERTEK / SK Pensiun	Utama	120.040,-															26.000,-
01.014	Dokumen Bimbingan Teknis Kepegawaian Kantor Regional I - XIV BKN		359.182,-															
01.014.051	Penyelenggaraan sosialisasi/workshop /diseminasi/seminar/publikasi	Utama	236.942,-															26.000,-
01.014.051.A	Rapat Koordinasi Kepegawaian Dengan Wilayah Kerja (Didalam Kantor)		84.092,-															140.000,-
01.014.051.B	Rapat Koordinasi Kepegawaian Dengan Wilayah Kerja (Di luar Kantor)		152.850,-															
01.014.052	Bimbingan teknis kepegawaian	Utama	122.240,-															140.000,-
01.015	Tata Naskah Kepegawaian yang di Kelola Kantor Regional I - XIV BKN		545.000,-															676.540,-
01.015.051	Pengelolaan tata naskah	Utama	545.000,-															
	Total		3.233.700,-															3.233.700,-

Pekanbaru, 09 Maret 2020
Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru



Drs. Margi Prayitno, MAP
NIP. 19641207 198303 1 001